

The *Politics of Hate Speech* Akun Fufufafa: Perspektif Etika Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kohesi Sosial

Hery Wahyudi Marpaung¹, Hasan Sazali^{2*}

^{1,2*} Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: herywahyudimarpaung@gmail.com¹, hasansazali@uinsu.ac.id^{2*}

Histori Artikel:

Dikirim 10 Maret 2025; *Diterima dalam bentuk revisi* 30 April 2025; *Diterima* 20 Mei 2025; *Diterbitkan* 30 Mei 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena ujaran kebencian politik yang dilakukan oleh akun anonim "fufufafa", dengan fokus pada perspektif etika komunikasi dan dampaknya terhadap kohesi sosial. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, analisis dilakukan terhadap konten unggahan akun tersebut menggunakan kerangka wacana kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian yang disampaikan bersifat sistematis, menyerang aspek personal tokoh politik, serta sarat muatan ideologis yang menegaskan dikotomi moral antara "kita" dan "mereka." Strategi komunikasi seperti simplifikasi, labelisasi, framing, dan agitasi sosial digunakan untuk membentuk opini publik secara negatif dan memperkuat polarisasi. Dari sudut pandang etika komunikasi, tindakan tersebut mencerminkan penyimpangan moral karena mengabaikan nilai empati, penghormatan, dan tanggung jawab sosial dalam komunikasi digital. Dampak psikososial yang ditimbulkan meliputi stigmatisasi kelompok minoritas, trauma emosional pada individu, serta fragmentasi dalam komunitas daring. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital, penguatan regulasi komunikasi etis, dan partisipasi publik untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian serta menjaga integrasi sosial dalam demokrasi digital. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam mengembangkan strategi penanganan ujaran kebencian di Indonesia.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian; Etika Komunikasi; Kohesi Sosial; Media Digital.

Abstract

This study discusses the phenomenon of political hate speech carried out by anonymous accounts "fufufafa", focusing on the perspective of communication ethics and its impact on social cohesion. Through a qualitative approach and case study method, an analysis was carried out on the content of the account upload using a critical discourse framework. The results of the study show that hate speech conveyed is systematic, attacks the personal aspects of political figures, and is full of ideological content that emphasizes the moral dichotomy between "us" and "them." Communication strategies such as simplification, labeling, framing, and social agitation are used to negatively shape public opinion and reinforce polarization. From the point of view of communication ethics, the act reflects a moral deviation because it ignores the values of empathy, respect, and social responsibility in digital communication. The psychosocial impacts that are caused include the stigmatization of minority groups, emotional trauma to individuals, and fragmentation in online communities. This research emphasizes the importance of digital literacy, strengthening ethical communication regulations, and public participation to prevent the spread of hate speech and maintain social integration in digital democracy. These findings are expected to be an academic and practical contribution in developing strategies for handling hate speech in Indonesia.

Keyword: Hate Speech; Communication Ethics; Social Cohesion; Digital Media.

1. Pendahuluan

Politik ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang memanfaatkan ekspresi kebencian untuk mencapai tujuan politik, seperti membentuk opini publik, menjatuhkan lawan politik, atau menarik dukungan dari massa. Wardhani & Ekawati (2020) menyatakan bahwa ujaran kebencian dalam politik tidak semata-mata timbul akibat dorongan emosional, tetapi juga sebagai strategi yang sengaja dirancang untuk menciptakan dikotomi antara "kami" dan "mereka." Isu-isu sensitif seperti agama, ras, dan ideologi sering dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat, terutama dalam politik seperti pemilihan umum (Astrika & Yuwanto, 2019). Di era digital saat ini, peran media dalam penyebaran politik kebencian semakin meluas karena kecepatan dan luasnya jangkauan informasi yang disebarkan tanpa adanya proses penyaringan yang memadai. Fahrudin *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa media sosial kini menjadi saluran utama bagi penyebaran ujaran kebencian yang efektif. Yazid *et al.* (2023) juga mencatat bahwa algoritma media sosial dapat memperburuk situasi ini karena konten yang bersifat negatif cenderung mendapatkan lebih banyak eksposur. Fenomena ini meningkatkan potensi polarisasi dalam masyarakat dan menjadikan politik ujaran kebencian sebagai ancaman nyata terhadap keberlanjutan demokrasi digital. Indonesia telah mengalami berbagai kasus ujaran kebencian yang menunjukkan bagaimana kebencian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Salah satu contohnya adalah pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana isu agama digunakan untuk menyerang salah satu kandidat. Chandra *et al.* (2020) menyebutkan bahwa kampanye tersebut dipenuhi oleh narasi diskriminatif yang memecah belah masyarakat berdasarkan identitas keagamaan. Seperti yang dijelaskan oleh Febryanti *et al.* (2022), hal ini membuktikan bahwa ujaran kebencian bukanlah sekadar wacana semata, melainkan alat politik yang mampu memperdalam jurang konflik antarumat beragama di ruang publik. Salah satu contoh mencolok dari fenomena ini adalah serangan verbal terhadap Presiden Joko Widodo. Ibrahim dan Yusof (2020) menyatakan bahwa konten-konten yang beredar tidak hanya bernada negatif, tetapi juga sarat dengan disinformasi yang merusak citra pemerintah. Sebagaimana dicatat oleh Nabilah *et al.* (2022), dampak dari ujaran kebencian ini tidak hanya mengarah kepada tokoh publik, tetapi juga memperburuk polarisasi sosial di masyarakat. Dalam media sosial telah menjadi sarana subur untuk penyebaran ujaran kebencian secara sistematis dan masif. Dalam lanskap digital Indonesia, muncul berbagai akun yang aktif menyebarkan ujaran kebencian, salah satunya adalah akun Kaskus dengan nama pengguna 'fufufafa'. Akun ini dikenal sering menanggapi isu-isu politik dengan nada provokatif yang menargetkan tokoh atau kelompok tertentu.

Handoko *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa konten yang dibagikan sering kali bernuansa konspiratif dan berisi tuduhan tanpa dasar, namun tetap mendapat perhatian luas dari pengguna lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Kartika & Nurhayati (2023), daya tarik dari konten negatif seperti ini terbukti cukup kuat dalam membentuk opini publik di ruang digital. Lebih dari sekadar menyebarkan ujaran kebencian, akun 'fufufafa' juga berfungsi sebagai simpul komunikasi bagi pengguna lain yang memiliki pandangan serupa. Wardhana *et al.* (2024) menjelaskan bahwa interaksi yang muncul dalam forum Kaskus menunjukkan bahwa narasi kebencian dari akun ini sering mendapatkan dukungan dalam bentuk balasan, penyebaran ulang, atau bahkan apresiasi. Fenomena ini menciptakan efek gema (echo chamber), di mana ujaran kebencian terus diperkuat dan dianggap sah dalam komunitas tertentu. Akun ini kemudian berperan sebagai agen aktif dalam penyebaran disinformasi dan memperburuk polarisasi sosial-politik di dunia maya. Keberadaan akun 'fufufafa' di dunia digital tidak bisa dianggap sebagai aktivitas biasa. Handoko *et al.* (2023) menilai bahwa pola komunikasi yang digunakan oleh akun ini terlihat terstruktur dan mengikuti ritme politik tertentu, seperti masa kampanye, unjuk rasa, atau polemik kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas akun tersebut bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan bagian dari strategi komunikasi yang dibangun dengan sengaja. Dengan gaya retorika yang provokatif, akun ini memainkan peran sebagai aktor politik nonformal yang memengaruhi opini publik. Akibatnya, narasi yang diangkat seringkali memperburuk perbedaan sosial di masyarakat. Pengaruh akun 'fufufafa' terlihat jelas dari tingginya interaksi yang diterima, mulai dari komentar, dukungan, hingga penyebaran ulang kontennya.

& Nurhayati (2023) menjelaskan bahwa kekuatan akun ini terletak pada kemampuannya mengemas isu politik menjadi narasi emosional yang cepat menarik perhatian publik. Dalam hal ini, ujaran kebencian bukan lagi sekadar luapan emosi individu, melainkan bagian dari strategi komunikasi digital yang memiliki dampak besar. Menurut Suci (2024), ujaran kebencian yang terus-menerus disebarkan oleh akun ini mendorong terbentuknya sentimen permusuhan antarkelompok berdasarkan identitas seperti agama, ras, dan pandangan politik. Fragmentasi sosial semakin terasa, karena pengguna media sosial cenderung membentuk kelompok tertutup yang hanya memperkuat pandangan mereka masing-masing. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi negara, melemahkan rasa kebersamaan, dan bahkan memicu konflik horizontal di dunia nyata. Kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan politik dalam era demokrasi digital. Selain dampak sosial, perilaku akun tersebut juga memengaruhi pola komunikasi publik di media sosial. Simon & Arifianto (2021) menyatakan bahwa normalisasi ujaran kebencian menjadikan ruang diskusi publik dipenuhi dengan emosi negatif dan minimnya pertimbangan rasional. Masyarakat menjadi terbiasa menanggapi isu politik dengan kemarahan, alih-alih dialog sehat. Ridwan *et al.* (2024) menambahkan bahwa hal ini menandai kegagalan media sosial sebagai ruang inklusif yang seharusnya mendorong partisipasi konstruktif dari warganet. Akibatnya, ruang digital tidak lagi mencerminkan semangat demokrasi, melainkan berubah menjadi arena konflik yang melelahkan secara sosial dan psikologis.

Peneliti mencermati bahwa fenomena ujaran kebencian dalam ranah politik digital kini tidak hanya sekadar gejala komunikasi spontan, melainkan manifestasi dari strategi komunikasi yang dirancang dengan cermat. Ujaran kebencian berkembang menjadi alat yang digunakan untuk mengendalikan opini publik dan menciptakan polarisasi sosial yang semakin tajam. Keberadaan akun-akun provokatif yang beroperasi secara konsisten dalam momentum-momentum politik mengindikasikan adanya pola komunikasi yang sengaja dibangun untuk menanamkan sentimen negatif kepada kelompok atau individu tertentu. Beberapa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai dampak dari ujaran kebencian, khususnya dalam konteks politik. Yazid *et al.* (2023) menilai bahwa algoritma media sosial memperburuk penyebaran ujaran kebencian karena cenderung memunculkan konten yang memicu emosi pengguna. Sementara itu, Wardhani & Ekawati (2020) menegaskan bahwa ujaran kebencian berbasis agama memiliki dampak besar dalam membentuk sikap masyarakat, bahkan dapat memperburuk perbedaan yang ada. Dalam aspek hukum, Kartika & Nurhayati (2023) menyoroti lemahnya penegakan aturan terhadap pelaku ujaran kebencian, yang malah memperkuat siklus kekerasan simbolik di ruang digital. Temuan ini menunjukkan bahwa politik ujaran kebencian bukan hanya persoalan etika, tetapi juga menyentuh aspek hukum, teknologi, dan sosial budaya. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas ujaran kebencian dari sisi hukum, sosial, dan teknologi, tetapi jarang yang mengkaji secara mendalam siapa aktor yang terlibat serta bagaimana dinamika psikologis di balik perilaku tersebut. Sejumlah penelitian masih terbatas pada aspek normatif dan deskriptif, tanpa menyentuh aspek strategis serta motif personal yang mendasari perilaku ujaran kebencian. Oleh karena itu, memahami aktor yang terlibat dan alasan psikologis di balik keterlibatannya sangat penting untuk membangun kebijakan pencegahan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat akun 'fufufafa' sebagai studi kasus. Dengan meneliti aktivitas akun ini, penelitian berusaha memahami bagaimana politik ujaran kebencian dibangun dan dijalankan secara sistematis dalam ruang digital. Penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam memahami fenomena ujaran kebencian politik yang terus berkembang, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Yin, 2018), untuk menganalisis aktivitas akun ‘fufufafa’ dalam menyebarkan ujaran kebencian politik di ruang digital. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif terhadap konten dan interaksi pengguna di platform Kaskus. Analisis dilakukan dengan pendekatan wacana kritis (Fairclough, 2010), untuk mengungkap makna, ideologi, dan strategi komunikasi yang tersembunyi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman kontekstual terhadap dinamika ujaran kebencian digital. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan diskusi sejawat guna memastikan keabsahan dan objektivitas temuan dalam proses interpretasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Konstruksi Politik Ujaran Kebencian pada Akun ‘fufufafa’

Dalam era digital, ujaran kebencian tidak hanya menjadi fenomena sosial, tetapi juga politik yang mengakar kuat dalam praktik komunikasi daring. Ruang-ruang diskusi virtual seperti forum Kaskus memberikan kebebasan berekspresi yang luas, namun sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi kebencian yang bersifat personal, politis, dan diskriminatif. Peneliti mengidentifikasi konstruksi politik dari ujaran kebencian yang dilakukan oleh akun “fufufafa” di Kaskus dalam rentang waktu 2014–2018.



Gambar 1. Konten akun fufufafa di Kaskus pada 2014–2018

Tabel 1. Kronologis Hate Speech oleh Akun “Fufufafa” di Forum Kaskus

Konten	Unggahan	Akun	Media
Udah dibela-belain jadi mualaf, eh malah dicerain istri, punya anak homo, biji tinggal satu, gagal nyapres, duit aabis, aduh	2014-04-28	Fufufafa	Kaskus
Saya lagi membayangkan prabowo mendaki semeru, trus pas nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih, lalu dia berteriak, “titielkkkkk kembalilah ke pelukanku” Trus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak, pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar.	2014-06-21	Fufufafa	Kaskus

Masih pengen jadi presiden tu kebo	2016-06-16	Fufufafa	Kaskus
Kasih capres yg anaknya fashion designer homo	2017-09-17	Fufufafa	Kaskus
Istri cerai, anak homo. Trus mau lebaran sama siapa?	2018-06-19	Fufufafa	Kaskus

Akun “fufufafa” secara konsisten membentuk narasi ujaran kebencian dengan pendekatan yang menyerang aspek pribadi tokoh politik. Unggahan seperti "punya anak homo, biji tinggal satu, gagal nyapres" merupakan upaya untuk merendahkan integritas tokoh melalui eksploitasi isu keluarga dan identitas seksual. Hal ini menunjukkan bentuk ujaran kebencian yang bersifat ad hominem, yakni serangan terhadap pribadi, bukan argumen substantif (Demir, 2025). Fufufafa menggunakan strategi penyederhanaan untuk menggiring opini publik bahwa kegagalan politik disebabkan oleh kegagalan moral atau keluarga tokoh yang diserang. Fufufafa juga merekonstruksi ujaran kebencian dengan menggunakan teknik naratif yang satiris dan sindiran. Sebagai contoh, unggahan yang membayangkan "Prabowo mendaki, lalu berteriak, ‘titiiekkkkk kembalilah ke pelukanku’" menggabungkan imajinasi fiktif dengan elemen ejekan seksual. Teknik semacam ini mencerminkan pelintiran simbolik dalam ujaran kebencian, yang dikaji oleh Döring & Mohseni (2020) sebagai disinformasi emosional untuk membentuk opini negatif. Taktik ini dengan halus mempermalukan target tanpa harus mengungkapkan pernyataan eksplisit yang mudah dihapus oleh moderator platform. Selain menyerang aspek pribadi, fufufafa juga menggunakan label penghinaan seperti "kebo" atau "homo" untuk memperkuat persepsi inferior terhadap lawan politik. Ini sejalan dengan temuan Margono *et al.* (2024) yang menyebutkan bahwa ujaran kebencian digital di Indonesia sering kali berbentuk pelecehan verbal berbasis fisik dan orientasi seksual. Labelisasi ini bukan hanya sebuah cemoohan, melainkan upaya untuk menciptakan kategori sosial negatif terhadap kelompok tertentu yang diasosiasikan dengan calon tertentu, sebagai bagian dari strategi politik identitas.

Rekonstruksi pesan kebencian yang dilakukan oleh fufufafa juga berlangsung secara berulang dan konsisten sepanjang tahun politik, seperti yang terlihat dari kronologis unggahan pada periode 2014 hingga 2018. Pola ini menunjukkan adanya komunikasi yang terencana dan terstruktur dalam penyebaran narasi kebencian. Menurut Winarni *et al.* (2019), praktik ujaran kebencian yang konsisten mengindikasikan strategi politik jangka panjang untuk memengaruhi persepsi publik. Fenomena ini menandakan bahwa ujaran kebencian bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan bagian dari taktik komunikasi yang sistematis. Di balik ujaran kebencian yang tampak vulgar, terdapat makna ideologis yang membentuk dikotomi moral antara "kita" dan "mereka". Fufufafa secara implisit membangun citra bahwa tokoh yang diserangnya tidak hanya tidak layak secara politik, tetapi juga secara moral. Ini menguatkan temuan Hassim *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa ujaran kebencian tidak hanya berupa penghinaan, tetapi juga instrumen ideologis untuk menyingkirkan pihak lain dari ruang wacana publik. Dalam hal ini, “moralitas” digunakan sebagai senjata untuk mengecualikan pihak yang dianggap berbeda atau menyimpang. Strategi komunikasi fufufafa juga mencerminkan pengaruh kuat framing ideologis terhadap publik. Penyebutan “anak homo” dan “fashion designer homo” tidak hanya digunakan untuk mengejek, tetapi juga menyisipkan pemaknaan negatif terhadap profesi dan orientasi tertentu. Ini mencerminkan pola diskriminasi berbasis nilai konservatif yang masih dominan dalam diskursus politik Indonesia (Setianto *et al.*, 2023).

Dengan cara ini, ujaran kebencian berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dominasi nilai-nilai mayoritas dan menolak representasi kelompok marginal di ruang politik. Tindakan fufufafa juga mencerminkan penggunaan strategi agitasi yang bersifat memecah dan memprovokasi. Ujaran seperti “Trus mau lebaran sama siapa?” menyiratkan eksklusi sosial terhadap individu yang diserang. Pemikiran ini sejalan dengan Moshman (2020) yang berpendapat bahwa ujaran kebencian tidak hanya membangun narasi negatif, tetapi juga menciptakan “others” yang tidak diinginkan dalam komunitas. Fufufafa memanfaatkan sentimen kolektif untuk menciptakan tekanan sosial dan menstigmatisasi pihak tertentu dalam konteks kebangsaan dan keagamaan. Ujaran yang disebarkan oleh fufufafa memperlihatkan bagaimana media sosial memungkinkan distribusi ujaran kebencian secara luas, cepat, dan tanpa akuntabilitas yang memadai. Nurochman *et al.* (2024) menyatakan bahwa platform seperti Kaskus menjadi tempat subur bagi penyebaran ujaran kebencian karena kurangnya moderasi

dan anonimitas pengguna. Dalam strategi komunikasi fufufafa dapat dipandang sebagai bentuk "hate spin" (Winarni *et al.*, 2019), yakni penciptaan narasi kebencian yang sistematis untuk memecah belah opini publik dan memanfaatkan polarisasi politik sebagai modal kekuasaan.

Tabel 2. Makna, Ideologi, dan Strategi Komunikasi Terselubung dalam Konten Ujaran Kebencian oleh Fufufafa

Konten	Makna	Ideologi	Strategi	Referensi
Punya anak homo, tinggal satu, gagal nyapres	Menyerang identitas pribadi dan seksual untuk menurunkan legitimasi politik	Dominasi nilai heteronormatif dan patriarkis	Simplifikasi, generalisasi, dan serangan ad hominem	Demir (2025), Margono <i>et al.</i> (2024)
Titiekkkkk kembali ke pelukanku	Menggunakan imajinasi seksual dan narasi satiris untuk mempermalukan figur politik	Pelemahan nilai maskulinitas tokoh politik	Sindiran simbolik dan disinformasi emosional	Döring & Mohseni (2020), Hassim <i>et al.</i> (2024)
Masih pengen jadi presiden tuh kebo	Mendegradasi figur dengan sebutan hewan, menciptakan kesan inferior	Konservatisme populis yang anti perbedaan	Labelisasi dan penguatan dikotomi moral	Winarni <i>et al.</i> (2019), Moshman (2020)
Kasihannya capres yg anaknya fashion designer homo	Menyematkan stereotip negatif terhadap profesi dan orientasi anak calon	Stigmatisasi terhadap kelompok LGBT dan profesi kreatif	Framing ideologis melalui bahasa ejekan	Setianto <i>et al.</i> (2023), Hassim <i>et al.</i> (2024)
Istri cerai, anak homo. Trusmi mau lebaran sama siapa?	Membangun narasi eksklusif sosial berbasis kehidupan pribadi	Pengecualian sosial berbasis norma keluarga tradisional	Agitasi berbasis tekanan sosial dan kolektivitas nilai	Moshman (2020), Nurochman <i>et al.</i> (2024)

Peneliti mengidentifikasi bahwa ujaran kebencian yang disebarkan oleh akun “fufufafa” bukan sekadar ekspresi spontan atau lelucon digital, melainkan bagian dari konstruksi wacana yang sarat dengan makna ideologis dan strategi komunikasi yang sistematis. Melalui serangan terhadap aspek pribadi, seperti orientasi seksual, status keluarga, dan profesi anak tokoh politik, fufufafa membentuk narasi yang bertujuan menciptakan dikotomi moral antara pihak yang dianggap “normal” dan “menyimpang”. Taktik seperti penyederhanaan (simplifikasi), framing, dan agitasi sosial digunakan untuk memperkuat dominasi nilai-nilai konservatif dan menyingkirkan representasi kelompok marginal dalam ruang politik. Interpretasi ini sejalan dengan temuan Demir (2025), Hassim *et al.* (2024), dan Setianto *et al.* (2023), yang menunjukkan bahwa ujaran kebencian di ruang digital telah berkembang menjadi alat propaganda yang efektif untuk memperburuk polarisasi sosial dan meneguhkan ideologi mayoritas. Berdasarkan hasil analisis, peneliti mencatat bahwa ujaran kebencian yang disusun oleh fufufafa memiliki dimensi struktural yang mencerminkan intensi politis tertentu. Ujaran tersebut tidak hanya menasar karakter pribadi, tetapi juga membentuk kerangka berpikir publik yang bias terhadap kelompok atau identitas tertentu. Hal ini menandakan bahwa ujaran kebencian dalam ruang digital tidak lagi berada dalam ranah komunikasi personal, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari strategi komunikasi politik yang kompleks. Penggunaan bahasa simbolik, stereotip, dan narasi eksklusif menjadi teknik utama dalam membentuk opini publik yang berpihak, sekaligus menciptakan ruang publik yang tidak sehat secara demokratis.

Penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital dan penguatan etika komunikasi untuk menghadapi dinamika politik digital yang semakin tajam. Pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam merumuskan regulasi serta mekanisme pengawasan yang dapat membedakan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian yang merusak kohesi sosial. Penelitian ini juga membuka peluang untuk riset lebih lanjut mengenai peran aktor anonim dalam membentuk narasi politik yang sarat dengan muatan ideologis, serta dampaknya terhadap persepsi publik dan kualitas demokrasi di Indonesia.

3.1.2 Dampak Psikososial Politik Ujaran Kebencian terhadap Masyarakat Digital

Ujaran kebencian yang disampaikan oleh akun “fufufafa” memberikan dampak psikososial yang signifikan dalam masyarakat digital, terutama terhadap korban yang menjadi sasaran langsung. Ucapan bernada diskriminatif seperti “punya anak homo” atau “istri cerai, anak homo” tidak hanya merendahkan individu, tetapi juga memperkuat stigma terhadap kelompok tertentu. Menurut Afdal *et al.* (2021), ujaran semacam ini dapat menimbulkan trauma psikologis berupa kecemasan, depresi, bahkan hilangnya kepercayaan diri. Di ruang digital, tekanan semacam ini dapat menyebar secara masif dan meninggalkan luka sosial yang sulit dipulihkan secara emosional. Dalam komunitas digital, ujaran kebencian yang dilakukan oleh fufufafa juga menciptakan iklim sosial yang penuh kecurigaan dan ketegangan antarkelompok. Ucapan seperti “masih pengen jadi presiden tuh kebo” menjadi simbol penghinaan yang tidak hanya ditujukan pada individu, tetapi juga pada kelompok pendukungnya. Hal ini mencerminkan apa yang disebut oleh Astrika & Yuwanto (2019) sebagai bentuk retorika dehumanisasi, yang dapat memperlemah kohesi sosial. Masyarakat yang terus-menerus terpapar ujaran semacam ini akan lebih mudah terpecah dan mengalami disintegrasi sosial. Polarisasi politik menjadi konsekuensi lain dari ujaran kebencian yang terus diproduksi. Fufufafa membentuk narasi yang mengkotak-kotakkan masyarakat berdasarkan pilihan politik dan identitas moral. Seperti yang disampaikan oleh Wardhani & Ekawati (2020), ujaran kebencian menyebabkan publik semakin mengidentifikasi diri dalam kelompok “kami” versus “mereka”, yang pada akhirnya menumbuhkan fanatisme sempit. Akibatnya, ruang diskusi publik di dunia maya berubah menjadi arena konfrontasi, bukan lagi ruang dialog yang sehat dan produktif. Kehadiran ujaran kebencian dalam forum-forum digital mempercepat normalisasi kekerasan verbal di masyarakat. Konten yang dibuat oleh fufufafa secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa pelecehan terhadap kelompok tertentu adalah hal yang lumrah. Menurut Sukmono & Kusuma (2021), hal ini berdampak pada penurunan sensitivitas sosial terhadap penderitaan orang lain. Ketika ujaran kebencian dianggap sebagai humor atau sarkasme biasa, maka nilai-nilai kemanusiaan terancam tergerus dalam pola komunikasi daring yang tidak etis.

Fenomena ujaran kebencian yang disebarkan oleh fufufafa menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam praktik komunikasi digital. Alih-alih mengedepankan empati dan saling menghormati, komunikasi digital kini cenderung bebas nilai dan tidak bertanggung jawab. Azhar & Soponyono (2020) menegaskan bahwa banyak pengguna media sosial yang menganggap kebebasan berekspresi berarti bebas dari tanggung jawab etis. Ini tercermin dalam gaya komunikasi fufufafa yang vulgar, menyerang, dan tidak mempertimbangkan dampak emosional pada sasaran ucapannya. Komunikasi digital saat ini juga menunjukkan fenomena di mana konten negatif justru mendapatkan lebih banyak perhatian. Ujaran seperti “fashion designer homo” yang disampaikan oleh fufufafa mencerminkan bagaimana konten kontroversial digunakan untuk memancing interaksi. Wardhani & Ekawati (2020) menyebut ini sebagai umpan balik negatif, di mana perhatian dan respons publik terhadap ujaran kebencian justru memperkuat keberadaannya. Di sini terlihat anomali etika: perilaku tidak etis tidak ditolak, melainkan mendapatkan penguatan melalui algoritma dan keterlibatan pengguna. Tantangan lain dalam konteks etika komunikasi adalah minimnya kesadaran literasi digital di kalangan pengguna. Fufufafa merupakan representasi dari pengguna yang menganggap ruang digital sebagai zona bebas moral. Dalam pandangan Jusnita & Ali (2022), masyarakat masih kurang memahami konsekuensi dari ujaran yang mereka sampaikan di dunia maya, baik dari segi hukum maupun sosial.

Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan komunikasi digital yang tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga etika dan tanggung jawab sosial. Ujaran yang disebar oleh fufufafa menjadi cermin bagaimana etika komunikasi telah kehilangan daya tawarnya dalam ruang publik digital. Ketika ujaran yang menyudutkan, mendiskriminasi, dan menghina tidak mendapatkan sanksi sosial, komunikasi digital berubah menjadi instrumen kekuasaan yang menyimpang. Menurut Sofia & Sadida (2021), fenomena ini menandakan kegagalan kolektif dalam menjaga nilai-nilai moral dalam percakapan publik. Ruang digital, yang seharusnya menjadi sarana pertukaran gagasan, malah berubah menjadi ruang produksi kebencian yang semakin sulit dikendalikan.

3.2 Pembahasan

Dalam komunikasi politik digital kontemporer, ujaran kebencian telah berkembang menjadi instrumen politik yang sistematis untuk mendiskreditkan lawan politik melalui serangan personal yang melampaui batas-batas etika komunikasi. Analisis terhadap akun "fufufafa" di forum Kaskus periode 2014-2018 mengungkapkan pola konstruksi ujaran kebencian yang terstruktur dan konsisten, di mana target serangan tidak hanya ditujukan pada aspek politik, tetapi juga kehidupan pribadi dan keluarga tokoh politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Demir (2025), ujaran kebencian dalam politik populis sering kali menggunakan retorika anti-oposisi yang bertujuan menciptakan polarisasi dan delegitimasi lawan politik melalui serangan personal yang sistematis. Konstruksi ujaran kebencian yang dilakukan oleh akun "fufufafa" menunjukkan penggunaan strategi komunikasi yang kompleks dan berlapis, di mana dalam unggahan seperti "punya anak homo, biji tinggal satu, gagal nyapres," terlihat adanya upaya untuk menghubungkan kegagalan politik dengan aspek kehidupan pribadi dan keluarga, yang secara implisit menyiratkan bahwa ketidaklayakan seseorang dalam politik dapat dinilai dari kondisi personal atau keluarganya. Strategi komunikasi yang digunakan fufufafa sejalan dengan temuan Margono *et al.* (2024) yang mengidentifikasi bahwa dinamika ujaran kebencian di media sosial Indonesia sering kali mengambil bentuk serangan terhadap identitas personal, orientasi seksual, dan status keluarga sebagai cara untuk melemahkan kredibilitas politik seseorang. Penggunaan frasa "anak homo" tidak hanya berfungsi sebagai penghinaan terhadap individu yang diserang, tetapi juga memperkuat stigma negatif terhadap komunitas LGBT secara keseluruhan, menciptakan efek diskriminasi yang lebih luas dalam masyarakat. Analisis lebih mendalam terhadap pola komunikasi akun "fufufafa" mengungkapkan adanya strategi simplifikasi isu politik yang kompleks menjadi narasi personal yang mudah dipahami namun menyesatkan. Fairclough (2010) dalam analisis wacana kritisnya menjelaskan bahwa praktik diskursif semacam ini berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari substansi politik menuju aspek personal yang lebih mudah diserang dan dipahami oleh audiens, sehingga fufufafa secara konsisten menggunakan teknik reduksi kompleksitas politik menjadi isu moral dan personal, menciptakan kesan bahwa kegagalan dalam kehidupan pribadi secara otomatis menunjukkan ketidakmampuan dalam kepemimpinan politik.

Dari perspektif etika komunikasi, praktik yang dilakukan oleh akun "fufufafa" menunjukkan pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar komunikasi yang etis dan bertanggung jawab. Setianto *et al.* (2023) dalam studinya tentang konsumsi konten religius online di kalangan remaja Banten menemukan bahwa ujaran kebencian di media sosial sering kali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dasar dan menciptakan lingkungan komunikasi yang tidak sehat bagi perkembangan moral masyarakat, khususnya generasi muda. Pelanggaran prinsip empati terlihat jelas dalam cara fufufafa menyerang aspek personal yang sangat sensitif, seperti orientasi seksual anak dan kondisi keluarga tokoh politik. Afdal *et al.* (2021) dalam penelitiannya tentang perbedaan kecenderungan melakukan ujaran kebencian antara laki-laki dan perempuan menemukan bahwa ujaran kebencian yang menasar aspek personal dan keluarga dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban, termasuk kecemasan, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri. Aspek tanggung jawab sosial dalam komunikasi juga diabaikan secara sistematis oleh akun "fufufafa", sebagaimana dijelaskan Sofia dan Sadida (2021) bahwa motivasi mengekspresikan prasangka di media sosial sering kali didorong oleh orientasi religius yang sempit dan pemahaman yang keliru tentang kebebasan berekspresi, di mana fufufafa tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari ujaran

kebenciannya terhadap kohesi sosial dan toleransi dalam masyarakat. Ujaran kebencian yang sistematis seperti yang dilakukan oleh akun "fufufafa" memberikan dampak psikososial yang signifikan terhadap masyarakat digital, khususnya dalam fragmentasi sosial dan polarisasi politik. Nurochman *et al.* (2024) dalam studinya tentang dampak ujaran kebencian di media digital terhadap opini publik pra-pemilu menemukan bahwa eksposur berulang terhadap konten kebencian dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap tokoh politik dan menciptakan bias kognitif yang sulit dipulihkan. Dampak terhadap stigmatisasi kelompok minoritas menjadi salah satu konsekuensi paling serius, sebagaimana dijelaskan Hassim *et al.* (2024) bahwa ujaran kebencian di era digital tidak hanya berdampak pada individu yang diserang, tetapi juga menciptakan implikasi sosial yang lebih luas bagi kelompok yang diwakili oleh individu tersebut. Serangan terhadap orientasi seksual melalui ujaran seperti "anak homo" tidak hanya menyerang individu tertentu, tetapi juga memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap seluruh komunitas LGBT, menciptakan lingkungan sosial yang tidak aman bagi kelompok minoritas dan mendorong praktik diskriminasi yang lebih sistematis dalam masyarakat. Fragmentasi sosial dalam komunitas digital juga menjadi dampak signifikan dari praktik ujaran kebencian yang sistematis. Handoko *et al.* (2023) dalam studinya tentang tantangan menjaga persatuan dan kesatuan di tahun politik menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat menciptakan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat dan mengancam kohesi sosial, di mana ujaran kebencian yang dilontarkan fufufafa tidak hanya menyerang individu, tetapi juga menciptakan dikotomi moral antara "kita" dan "mereka", sehingga memperkuat polarisasi politik dan mengurangi ruang untuk dialog konstruktif antar kelompok yang berbeda pandangan politik. Salah satu dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya normalisasi kekerasan simbolik dalam ruang komunikasi digital. Döring dan Mohseni (2020) dalam analisisnya tentang ujaran kebencian berdasar gender di platform YouTube dan YouNow menemukan bahwa eksposur berulang terhadap konten kebencian dapat menurunkan sensitivitas masyarakat terhadap kekerasan verbal dan menciptakan standar komunikasi yang semakin kasar dan tidak etis.

Proses normalisasi ini sangat berbahaya karena dapat mengubah ekspektasi masyarakat terhadap komunikasi politik yang sehat. Febryanti *et al.* (2022) dalam studinya tentang tipologi ujaran kebencian di Twitter terkait kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19 menemukan bahwa normalisasi ujaran kebencian dapat menciptakan lingkaran setan di mana standar komunikasi yang kasar menjadi norma baru dalam diskursus publik. Chandra *et al.* (2020) dalam kajian filosofis tentang adiksi internet dan media sosial menjelaskan bahwa lingkungan digital yang dipenuhi konten negatif dapat menciptakan ketergantungan psikologis terhadap drama dan konflik, sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik pada konten yang sensasional dan kontroversial dibandingkan diskusi substansial, yang pada akhirnya dapat menciptakan insentif bagi pembuat konten untuk terus memproduksi ujaran kebencian sebagai cara untuk menarik perhatian dan engagement dari audiens. Ujaran kebencian sistematis seperti yang dilakukan oleh akun "fufufafa" memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik yang sehat. Astrika dan Yuwanto (2019) dalam studinya tentang signifikansi ujaran kebencian dan hoaks terhadap pemilih pemula di Kota Semarang menemukan bahwa eksposur terhadap konten kebencian dapat mempengaruhi preferensi politik pemilih muda dan menciptakan bias dalam proses pengambilan keputusan politik. Dampak terhadap partisipasi politik yang inklusif juga menjadi perhatian serius, sebagaimana dijelaskan Moshman (2020) dalam analisisnya tentang hubungan antara ujaran kebencian, kebebasan berbicara, dan kekerasan kelompok bahwa ujaran kebencian dapat menciptakan efek pendinginan (*chilling effect*) di mana kelompok tertentu menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam diskursus politik karena takut menjadi target serangan. Wardhana *et al.* (2024) dalam studinya tentang paradigma kebebasan berpendapat di ruang digital menjelaskan bahwa anonimitas dan budaya partisipasi di media sosial dapat menciptakan dominasi subjektivitas pengetahuan yang bias dan tidak berdasar pada fakta, di mana penggunaan anonimitas oleh akun "fufufafa" untuk menyebarkan ujaran kebencian menunjukkan bagaimana kebebasan berekspresi dapat disalahgunakan untuk merusak kualitas diskursus politik tanpa konsekuensi yang memadai bagi pelaku.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan strategi penanganan dan pencegahan yang komprehensif untuk mengatasi masalah ujaran kebencian dalam ruang digital. Azhar dan Soponyono (2020) dalam studinya tentang kebijakan hukum pidana dalam pengaturan ujaran kebencian di media sosial menekankan pentingnya pendekatan hukum yang tegas namun tetap mempertimbangkan keseimbangan dengan kebebasan berekspresi. Pendekatan edukasi dan literasi digital juga menjadi kunci dalam pencegahan ujaran kebencian, sebagaimana ditemukan Jusnita dan Ali (2022) dalam program penyuluhan literasi digital anti hoax, bullying, dan ujaran kebencian pada remaja di Kota Ternate bahwa pendidikan literasi digital yang komprehensif dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi dan merespons ujaran kebencian secara kritis. Sukmono dan Kusuma (2021) menekankan pentingnya penanaman budaya literasi sejak usia dini sebagai upaya pencegahan problem etik digital, di mana pendidikan etika komunikasi perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal untuk membentuk generasi yang memahami pentingnya komunikasi yang bertanggung jawab dan etis. Nabilah *et al.* (2022) dalam studinya tentang implikasi UU ITE terhadap kerukunan kehidupan beragama di ruang digital menjelaskan bahwa regulasi yang efektif harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat sipil dan platform media sosial dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung komunikasi yang etis dan konstruktif, termasuk pengembangan mekanisme pelaporan yang efektif, program dukungan untuk korban ujaran kebencian, dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya komunikasi yang bertanggung jawab dalam ruang digital.

4. Kesimpulan

Ujaran kebencian yang disebarkan akun “fufufafa” tidak sekadar merupakan ekspresi kebebasan berpendapat, melainkan representasi nyata dari strategi komunikasi politik yang manipulatif dan destruktif. Dari perspektif etika komunikasi, ujaran-ujaran tersebut telah melanggar prinsip dasar penghormatan terhadap martabat manusia, mengabaikan empati, serta memicu reproduksi narasi diskriminatif yang merusak tatanan wacana publik. Akibatnya, kohesi sosial dalam masyarakat digital melemah karena meningkatnya polarisasi, stereotip, dan fragmentasi identitas. Fufufafa menjadi simbol bagaimana ruang digital dimanfaatkan oleh aktor anonim untuk membentuk opini publik secara toksik, memperkuat eksklusi sosial, dan menciptakan efek gema kebencian yang meluas. Oleh karena itu, diperlukan intervensi komprehensif melalui pendidikan literasi digital, penguatan regulasi etika komunikasi, serta partisipasi aktif masyarakat sipil untuk menanggulangi politik ujaran kebencian dan menjaga keberlanjutan demokrasi digital yang inklusif dan sehat.

5. Daftar Pustaka

- Afdal, A., Ningsih, T., Maharani, U., Vanessha, V., & Susanti, R. (2021). Perbedaan kecenderungan melakukan ujaran kebencian (hate speech) antara laki-laki dan perempuan. *Jurnal Konseling Komprehensif*, 8(2), 1–13. <https://doi.org/10.36706/jkk.v8i2.15425>.
- Akbar, I., & Apriani, R. (2024). Upaya penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian (hate speech) dalam sistem game online. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 8(1), 141–148. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.141-148>.
- Astrika, L., & Yuwanto, Y. (2019). Ujaran kebencian dan hoaks: Signifikasinya terhadap pemilih pemula di Kota Semarang. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 107–117. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5433>.

- Azhar, A., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275–290. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.275-290>.
- Chandra, A., Latifah, A., Pratama, H., Maherdy, O., Imbar, R., & Mahayana, D. (2020). Kajian adiksi internet dan adiksi media sosial dari sisi filsafat sains. *Jurnal Algoritma*, 17(2), 409–423. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.17-2.409>.
- Demir, V. (2025). Erdoğan's populist rhetoric and hate speech: Anti-opposition discourse and the polarization of Turkish politics. *American Journal of Qualitative Research*, 9(2), 62–78. <https://doi.org/10.29333/ajqr/16245>.
- Döring, N., & Mohseni, M. (2020). Gendered hate speech in YouTube and YouNow comments: Results of two content analyses. *Studies in Communication and Media*, 9(1), 62–88. <https://doi.org/10.5771/2192-4007-2020-1-62>.
- Fahrudin, T., Sari, A., Lisanthoni, A., & Lestari, A. (2022). Analisis speech-to-text pada video mengandung kata kasar dan ujaran kebencian dalam ceramah agama Islam menggunakan interpretasi audiens dan visualisasi word cloud. *Skanika: Sistem Komputer dan Teknik Informatika*, 5(2), 190–202. <https://doi.org/10.36080/skanika.v5i2.2942>.
- Febryanti, D., Mahmud, Z., Putri, S., Ovalia, F., & Sekarwangi, Y. (2022). Tipologi hate speech di Twitter terkait kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19. *Jurnal Komunikasi Global*, 11(2), 274–299. <https://doi.org/10.24815/jkg.v11i2.26733>.
- Handoko, D., Sukri, B., Anas, K., Laia, L., & Meidizon, M. (2023). Tantangan masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tahun politik. *Jurnal Sosio-Komunika*, 2(1), 358–373. <https://doi.org/10.57036/jsk.v2i1.36>.
- Hassim, M., Nasir, N., & Zamri, N. (2024). Hate speech in the digital age: A study in terms of impact and social implications. *IJLGC*, 9(38), 1–12. <https://doi.org/10.35631/ijlgc.938001>.
- Ibrahim, N., & Yusof, M. (2020). Sindiran dalam media sosial: Perspektif lakuan bahasa (The irony in media social: The speech act perspective). *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(2), 269–288. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2020-3602-16>.
- Jusnita, N., & Ali, S. (2022). Penyuluhan literasi digital anti hoax, bullying, dan ujaran kebencian pada remaja di Kota Ternate. *Absyara: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 177–186. <https://doi.org/10.29408/ab.v3i2.6440>.
- Kartika, S., & Nurhayati, N. (2023). Ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam hukum dan perubahan sosial (Studi kasus pada masyarakat Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 99–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.7668>.
- Margono, H., Saud, M., & Ashfaq, A. (2024). Dynamics of hate speech in social media: Insights from Indonesia. *Global Knowledge, Memory and Communication*. <https://doi.org/10.1108/gkmc-11-2023-0464>.
- Moshman, D. (2020). "Hate speech," free speech, and group violence. In D. Moshman, *Personal, academic, and political freedom* (pp. 203–224). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000180-010>.

- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N., Rizal, D., & Warman, A. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap kerukunan kehidupan beragama di ruang digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>.
- Nurochman, A., Al-Hamdi, R., & Suswanta, S. (2024). Impact of hate speech in digital media on pre-election public opinion. *Jurnal Studi Komunikasi*, 8(3), 607–616. <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i3.8247>.
- Ridwan, R., Hermaliani, E., & Ernawati, M. (2024). Penerapan. *Computer Science (Co-Science)*, 4(1), 80–88. <https://doi.org/10.31294/coscience.v4i1.2990>.
- Setianto, Y., Nurjuman, H., & Handaningtias, U. (2023). Remaja, media sosial dan ujaran kebencian: Studi konsumsi online religious content di Banten. *Interaksi*, 12(1), 125–145. <https://doi.org/10.14710/interaksi.12.1.125-144>.
- Simon, S., & Arifianto, Y. (2021). Kerukunan umat beragama dalam bingkai iman Kristen di era disrupsi. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.58466/literasi.v1i1.28>.
- Sofia, C., & Sadida, N. (2021). Hubungan antara orientasi religius dengan motivasi mengekspresikan prasangka di media sosial. *Jurnal As-Salam*, 5(1), 53–61. <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.249>.
- Suci, P. (2024). Penanganan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi di media sosial. *Coverage: Journal of Strategic Communication*, 14(2), 146–165. <https://doi.org/10.35814/coverage.v14i2.5780>.
- Sukmono, N., & Kusuma, W. (2021). Kisah nabi dan rasul sebagai upaya penanaman budaya literasi pada anak usia dini untuk mencegah problem etik digital. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4944–4951. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1523>.
- Wardhana, A., Tiara, A., Sugihartati, R., Asmiyanto, T., & Wibowo, M. (2024). Paradigma kebebasan berpendapat: Anonimitas, budaya partisipasi, dan dominasi subyektivitas pengetahuan di ruang digital. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 913–922. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1468>.
- Wardhani, Y., & Ekawati, E. (2020). Ujaran kebencian berbasis agama: Kajian persepsi, respon, dan dampaknya di masyarakat. *Buletin Al-Turas*, 26(1), 153–171. <https://doi.org/10.15408/bat.v26i1.13698>.
- Winarni, L., Agussalim, D., & Bagir, Z. (2019). Memoir of hate spin in 2017 Jakarta's gubernatorial election; A political challenge of identity against democracy in Indonesia. *Religio*, 9(2), 134–156. <https://doi.org/10.15642/religio.v9i2.649>.
- Yazid, R., Umbara, F., & Sabrina, P. (2023). Deteksi ujaran kebencian dengan metode klasifikasi Naïve Bayes dan metode N-gram pada dataset multi-label Twitter berbahasa Indonesia. *Informatics and Digital Expert (INDEX)*, 4(2), 46–52. <https://doi.org/10.36423/index.v4i2.894>.
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage publications.